



## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **“METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK PENULISAN INFO SINGKAT”**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P.,M.Si**  
**NIP : 199206212019032001**  
**Instansi : Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2019**



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

### “METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK PENULISAN INFO SINGKAT”

Disusun Oleh:

Nama : Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P.,M.Si

NIP : 199206212019032001

Instansi : Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

(Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si.)

NIP. 199206212019032001

Menyetujui

Mentor,

Coach,

(Drs. Achmad Budiman, M.Pd.)

NIP. 196904221997031004

(Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.)

NIP. 196804011998032003

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LAPORAN AKTUALISASI .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
BAB II.....	4
PROFIL ORGANISASI .....	4
A. VISI MISI PUSAT PENELITIAN .....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN.....	4
C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI.....	6
BAB III.....	10
RANCANGAN AKTUALISASI .....	10
A. Identifikasi Isu .....	10
B. Pemilihan Isu Prioritas.....	14
C. Gagasan Pemecahan Isu.....	15
D. Rancangan Aktualisasi.....	16
BAB IV.....	22
PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	22

A.	PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	22
B.	Stakeholder .....	43
C.	Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala .....	44
D.	Analisis Dampak .....	44
E.	RENCANA JADWAL KEGIATAN .....	46
BAB V.....		48
PENUTUP .....		48
A.	KESIMPULAN .....	48
B.	SARAN.....	52
LAMPIRAN .....		54

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. KOMPOSISI PENELITI DI DPR RI	5
TABEL 2. PEMILIHAN ISU PRIORITAS	14
TABEL 3. RANCANGAN AKTUALISASI	16
TABEL 4. KEGIATAN I (PENELUSURAN DATA DAN INFORMASI)	22
TABEL 5. KEGIATAN II (PENDALAMAN MATERI)	29
TABEL 6. KEGIATAN III (IDENTIFIKASI PENDEKATAN KONSEP/REGULASI/TEORI)	32
TABEL 7. KEGIATAN IV (ANALISIS PENENTUAN TOPIK INFO SINGKAT DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI PENENTUAN TOPIK INFO SINGKAT)	35
TABEL 8. KEGIATAN V (PENULISAN INFO SINGKAT)	39
TABEL 9. RENCANA JADWAL KEGIATAN	46

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PEMINJAMAN INFO SINGKAT DI BAGIAN TATA USAHA PUSAT PENELITIAN DPR RI	23
GAMBAR 2. INDEKS BERITA UNTUK INFO SINGKAT EDISI SEBELUMNYA	25
GAMBAR 3.SCREENSHOOT KONSULTASI BERSAMA MENTOR	25
GAMBAR 4. KONSULTASI TATAP MUKA BERSAMA MENTOR PUSAT PENELITIAN DPR RI	26
GAMBAR 5. KONSULTASI BERSAMA PENELITI PUSAT PENELITIAN DPR RI	26
GAMBAR 6. DISKUSI BERSAMA MENTOR	30
GAMBAR 7. DISKUSI BERSAMA PENELITI SATU BIDANG KEPAKARAN	30
GAMBAR 8. DISKUSI BERSAMA REDAKSI INFO SINGKAT	30
GAMBAR 9.KEGIATAN TELAAH PUSTAKA	33
GAMBAR 10. PEMBIMBINGAN DENGAN PENELITI SATU BIDANG KEPAKARAN	33
GAMBAR 11.PEMINJAMAN KORAN DI PERPUSTAKAAN DPR RI	36
GAMBAR 12. MEMBACA KORAN	36
GAMBAR 13. KONSULTASI BERSAMA PENELITI SATU BIDANG KEPAKARAN	37
GAMBAR 14. KONSULTASI BERSAMA KOORDINATOR BIDANG PDN	37
GAMBAR 15. MENULIS INFO SINGKAT	40
GAMBAR 16. BIMBINGAN INFO SINGKAT PENELITI SATU KEPAKARAN	40
GAMBAR 17.MASUKAN DARI REDAKSI INFO SINGKAT	41
GAMBAR 18. DRAFT AKHIR INFO SINGKAT DIKIRIM KE REDAKSI	42
GAMBAR 19. INFO SINGKAT DITERBITKAN	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sector pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang professional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien .

Untuk dapat membentuk sosok PNS professional seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama petihan pemebntukan CPNS dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan professional.

Cara pelatihan yang lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia, disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih,dunia kini memasuki era revolusi industry 4.0 , yakni menekankan pada pola digital ekonomi , artificial intelegence, big data , robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*.

Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayanan public dalam masyarakat, merupakan asset negara yang pelru dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Salah satu bentuk program adalah peserta membuat program aktualisasi yang dimulai dengan membuat Rancangan Aktualisasi.

Rancangan aktualisasi, diperoleh dengan proses pembimbingan dari coach dan mentor. Rancangan aktualisasi yang telah dibuat selanjutnya diimplementasikan di lingkungan kerja melalui pembimbingan dari coach dan mentor sehingga akan didapatkan suatu output yang diharapkan berguna bagi unit organisasi serta CPNS memahami penerapan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik dan Anti Korupsi) serta nilai-nilai organisasi dalam kegiatan aktualisasi tersebut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **BAB II PROFIL ORGANISASI**

### **A. VISI MISI PUSAT PENELITIAN**

Visi Pusat Penelitian adalah sebagai berikut

**“Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal dan akuntabel  
dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Penelitian akan mewujudkannya dengan misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral dan akuntabel;
- 2) Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel; dan
- 3) Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal

### **B. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN**

Pusat Penelitian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 5 bidang, yaitu:

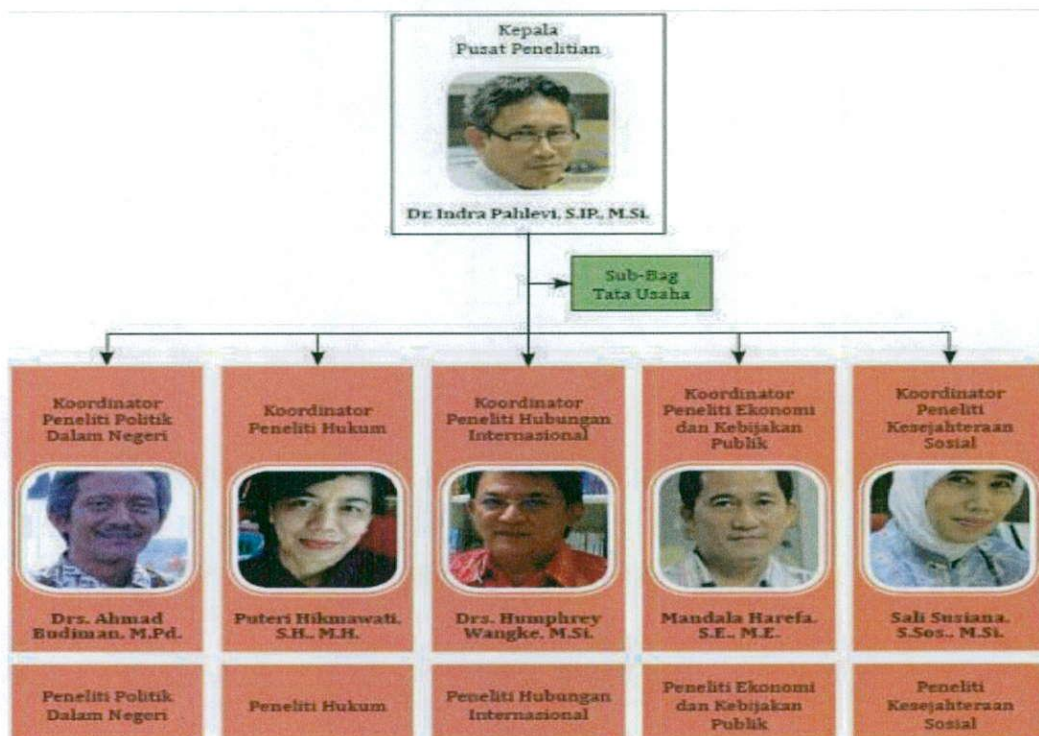
1. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik,
2. Bidang Kesejahteraan Sosial,
3. Bidang Politik Dalam Negeri,
4. Bidang Hukum, dan
5. Bidang Hubungan Internasional.

Komposisi Peneliti di Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR berjumlah 84 Orang, terdiri atas 3 Orang Profesor, 9 Orang Doktor, 7 Orang Kandidat Doktor, 64 Orang bergelar Magister yang merupakan lulusan dalam dan luar negeri, dan 1 orang bergelar Sarjana, berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti yang tertera dalam bentuk table yaitu :

**Tabel 1. Komposisi Peneliti di DPR RI**

Bidang Kajian	Profesor	Doktor	Kandidat Doktor	Magister	Sarjana
Politik Dalam Negeri		1		9	1
Hukum		1	1	14	
Hubungan Internasional	1	1	1	6	
Ekonomi dan Kebijakan Publik		2	4	22	
Kesejahteraan Sosial	2	4	1	13	

Adapun Struktur Organisasi Sebagai berikut :



## **C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Fungsi Pusat Penelitian**

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
- b. Perumusan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- i. Pelaksanaan tata usaha penelitian;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

## **2. Tugas Pusat Penelitian**

### **a. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Pusat Penelitian (Puslit) adalah memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.

#### **1) Kegiatan Penelitian**

Puslit melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI dalam rangka terwujudnya Parlemen Modern. Tahapan penelitian berupa perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan penelitian dan sosialisasi hasil penelitian yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.

#### **2) Kegiatan Pengkajian**

Puslit melakukan pengkajian sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPR RI. Pengkajian mencakup kegiatan analisis dan kajian-kajian mengenai kedewanan (Undang-Undang (legislasi), Anggaran dan Pengawasan).

##### **a) Buku**

Penerbitan buku menjadi hal yang sangat penting agar penyebaran hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media buku dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

##### **b) Jurnal Ilmiah**

Jurnal ilmiah Puslit berisi artikel yang ditulis oleh peneliti puslit maupun di luar puslit. Rata-rata jurnal ilmiah Puslit terbit

sebanyak dua kali dalam satu tahun. Penerbitan jurnal melalui serangkaian prosedur standar untuk menjamin kualitas artikel yang dimuat di dalamnya.

Secara umum Jurnal di Puslit sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:

1. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
2. Jurnal Politica
3. Jurnal Negara HUKUM (JNH)
4. Jurnal Aspirasi
5. Jurnal Kajian

c) Info Singkat

Info singkat memuat artikel dari 5 (lima) bidang penelitian di Puslit dan memuat kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis yang perlu mendapat perhatian DPR RI. Penerbitan Info Singkat ini bertujuan untuk memberikan bahan informasi atau masukan bagi pelaksanaan tugas Anggota DPR RI (di bidang Legislasi, anggaran, dan pengawasan).

**b. Tugas Pembantuan/Tugas Tambahan**

- 1) Pendampingan Pembahasan RUU di Alat Kelengkapan Dewan
- 2) Keterlibatan dalam kegiatan unit kerja lain baik yang diadakan oleh DPR RI maupun Setjen dan BK DPR RI.
- 3) Perbaikan Sistem Kerja dan Sumber daya Manusia
  - i. Pengembangan SDM;
  - ii. Perbaikan SOP dan Pedoman Kerja;
  - iii. Pengembangan dan Penyempurnaan *Website* Puslit;
  - iv. Penyusunan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP).

### **c. Tugas Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri**

Selain pemaparan diatas terkait dengan tugas pokok peneliti secara umum. Maka, dibawah ini akan dipaparkan mengenai tugas pokok peneliti dalam bidang politik dalam negeri, yaitu melakukan penelitian, pengkajian dan analisis mengenai :

1. Kelembagaan Negara : Keparlemenan, kepresidenan, keyudikatifan
2. Kelembagaan Politik : Kepartaian, system Pemilu, organisasi masyarakat, LSM dll
3. Kedaerahan : Pemerintah daerah, DPRD, hubungan pusat-daerah;
4. Komunikasi massa pers, media-cetak dan elektronik, dll
5. Politik lokal dan otonomi daerah; Birokrasi dan aparatur Negara; Pertahanan.

## **BAB III RANCANGAN AKTUALISASI**

### **A. Identifikasi Isu**

#### **1) ISU KE-1 “ Sulitnya menentukan topik dalam penulisan Info Singkat”**

##### ❖ **Masalah**

Permasalahan yang terjadi dalam menentukan topik dalam penulisan Info Singkat adalah sulitnya menyelaraskan antara isu yang aktual dengan kepakaran masing-masing dan kemanfaatan topik bagi kebutuhan Dewan. Sehingga diperlukan suatu metode dalam hal menentukan topik dalam penulisan Info Singkat.

##### ❖ **Penyebab**

Penulisan Info Singkat adalah hal baru bagi calon peneliti sehingga pemahaman tentang penulisan Info Singkat masih sangat beragam dan masih ditemui kebingungan terkait cara menentukan topik dalam penulisan Info Singkat. Selain itu, sering kali isu yang menjadi tren bukan merupakan topik yang menjadi kepakaran peneliti.

##### ❖ **Kondisi saat ini**

Ditemuinya kesulitan bagi peneliti dalam menentukan topik yang aktual dan disesuaikan dengan bidang kepakaran serta kemanfaatan bagi Kedewan.

##### ❖ **Kondisi yang diharapkan**

Adanya metode yang memudahkan peneliti dalam menentukan topik penulisan Info Singkat. Selain itu, calon peneliti khususnya menjadi mampu mengidentifikasi topik dalam penulisan Info Singkat yang relevan dengan kemanfaatan kedewan serta sesuai dengan

bidang kepekarannya.

❖ **Dampak**

Dampak jika isu tidak terselesaikan adalah tidak ada keseragaman pemahaman dalam penentuan topik Info Singkat yang dapat berakibat pada kualitas tulisan Info Singkat calon peneliti tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

❖ **Kaitan Isu dengan materi pelatihan**

Isu ini berkaitan dengan materi pelatihan **komitmen mutu** hal ini dikarenakan isu ini memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas penulisan Info Singkat.

**2) ISU KE-2 “ Belum seragamnya pemahaman calon peneliti terkait penulisan karya tulis dalam metodologi penelitian kualitatif”**

❖ **Masalah**

Isu kedua yang diajukan adalah masih ditemukannya perbedaan persepsi dalam menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi Penelitian merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap penelitian dikarenakan metodologi menjadi pedoman bagi peneliti untuk menemukan berbagai informasi yang digunakan sebagai penyusunan hasil penelitian.

❖ **Penyebab**

Perbedaan latar belakang pendidikan peneliti menyebabkan bergamnya persepsi dalam menggunakan metodologi kualitatif.

❖ **Kondisi saat ini**

Tidak samanya persepsi antar calon peneliti terkait penggunaan metodologi penelitian kualitatif seperti tidak seragamnya konsep jenis data, analisis dan interpretasi data teknik pemeriksaan keabsahan data dan yang lainnya.

❖ **Kondisi yang diharapkan**

Adanya keseragaman dalam penulisan penelitian khususnya dengan metodologi penelitian kualitatif. Sehingga diperlukan buku pedoman penulisan karya tulis dengan metode penelitian kualitatif.

❖ **Dampak**

Apabila isu ini tidak diselesaikan maka dampaknya adalah tidak ada keseragaman dalam menulis karya tulis khususnya untuk penelitian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

❖ **Kaitan Isu dengan materi pelatihan**

Isu ini berkaitan dengan materi pelatihan **komitmen mutu** karena isu ini mengharapkan adanya perbaikan kualitas dalam produk unit kerja.

**3) ISU KE-3 “ Metode menemukan kembali data penelitian yang tersimpan dalam bentuk gambar”**

❖ **Masalah**

Sulitnya menemukan kembali data penelitian yang terkumpul dalam bentuk gambar/foto ketika akan digunakan membutuhkan waktu lama untuk mencari file tersebut.

#### ❖ **Penyebab**

Pengumpulan data penelitian seringkali menemukan berbagai kendala , salah satunya adalah kendala pada saat penyimpanan data sekunder oleh peneliti. Data sekunder biasanya diberikan oleh instansi/ lembaga terkait dalam bentuk buku dan sebagai peneliti biasanya kita menyimpan dengan memfoto dokumen tersebut, seringkali dengan banyaknya data yang dikumpulkan peneliti lupa akan judul atau lokasi data tersebut disimpan pada saat akan menuangkannya ke dalam hasil penelitian.

#### ❖ **Kondisi saat ini**

Adanya kendala dalam menemukan kembali data penelitian berupa gambar sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali data yang diinginkan.

#### ❖ **Kondisi yang diharapkan**

Dibutuhkan tools yang dapat mengefisienkan permasalahan dalam menemukan data penelitian berupa gambar sehingga dapat menghemat waktu. Tools tersebut adalah OCR (*Optical Character Recognition*).

#### ❖ **Dampak**

Apabila isu ini tidak terselesaikan maka pencarian data apabila data tersebut sulit ditemukan menjadi tidak efektif yang berakibat menghambat penyelesaian laporan penelitian.

#### ❖ **Kaitan Isu dengan materi pelatihan**

Isu ini berkaitan dengan materi pelatihan **Komitmen mutu** , karena dengan adanya alat ini peneliti dapat mengerjakan pekerjaan lebih efisien.

## B. Pemilihan Isu Prioritas

**Tabel 2. Pemilihan Isu Prioritas**

No.	Isu	5Kriteria			Total	Peringkat
		U	S	G		
1.	Sulitnya menentukan topik dalam penulisan Info Singkat	5	4	4	13	1
2.	Belum seragamnya pemahaman calon peneliti terkait penulisan karya tulis dalam metodologi penelitian kualitatif	4	3	4	11	2
3.	Sulitnya menemukan kembali data penelitian yang tersimpan dalam bentuk gambar	3	3	2	8	3

milihan isu prioritas menggunakan metode analisis USG menunjukkan bahawa isu pertama yaitu “ sulitnya menentukan topik dalam penulisan Info Singkat” menjadi isu prioritas yang akan dijadikan proyek habituasi. Hal ini dikarenakan Info Singkat merupakan produk rutin di Pusat Penelitian yang setiap bulan diterbitkan. Namun demikian, masih terkendala pada sulitnya menentukan topik aktual yang memiliki kemanfaatan bagi dewan. Sulitnya menentukan topik ini

dapat menghambat keefektifan dalam menulis Info Singkat yang dikhawatirkan kurang memberikan kemanfaatan bagi anggota Dewan.

Selain itu, adanya metode untuk penentuan topik menjadi moment yang tepat bagi calon peneliti untuk belajar bagaimana menentukan topik dalam menulis Info Singkat , karena menulis Info Singkat merupakan hal baru bagi calon peneliti . Metode Identifikasi dalam penentuan topik penulisan Info Singkat akan dikeluarkan dalam bentuk leaflet.

Isu lainnya dianggap kurang mendesak untuk dijadikan proyek habituasi karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembuatan modul metodologi penelitian kualitatif tidak terlalu mendesak karena calon peneliti dapat terlebih dahulu membaca berbagai literature di perpustakaan ataupun melakukan pembimbingan dengan peneliti lain.
2. Penggunaan *Optical Character Recognition* (OCR) tidak terlalu mendesak untuk dijadikan proyek habituasi karena OCR dapat digunakan dengan cara meng-install aplikasi dan dampaknya hanya berpengaruh pada masing-masing individu.

### C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis pemilihan isu prioritas dengan metode USG maka gagasan pemecahan isunya adalah **Metode Identifikasi Penentuan Topik dalam Penulisan Info Singkat**. Metode tersebut dituangkan dalam bentuk leaflet.

## D. Rancangan Aktualisasi

Tabel 3. Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
A	B	C	D	E	F	G
1.	Penelusuran data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari data Info Singkat sebelumnya sebagai bahan identifikasi masalah dalam penentuan topik Info Singkat</li> <li>- Mencari data dan informasi baik melalui media cetak maupun elektronik untuk menemukan isu-isu aktual</li> <li>- Melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti</li> </ul>	Catatan data dan informasi yang diperlukan	Saya melakukan penelusuran data dan informasi terkait Info Singkat yang pernah ditulis sebelumnya sehingga terdapat kebaruan dalam tulisan dan juga mencari informasi dari media cetak maupun elektronik terkait isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan ( <b>komitmen</b>	Dengan melakukan penelusuran data dan informasi terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan maka akan mendukung pencapaian tugas Pusat Penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan.	Penelusuran data yang relevan dengan isu-isu yang menjadi perhatian sepekan dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu <b>Akuntabel, Profesional dan Integritas</b>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		satu bidang kepakaran		<b>mutu – akuntabilitas)</b>		
2.	Pendalaman materi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang PDN</li> <li>- Melakukan diskusi dengan Peneliti dengan kepakaran yang sama</li> <li>- Melakukan diskusi dengan salah satu redaksi</li> </ul>	Rencana penulisan Info Singkat berupa kumpulan isu-isu dalam sepekan	Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan diskusi bersama Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama terkait isu-isu yang menjadi perhatian dalam sepekan. <b>(Komitmen mutu)</b>	Dengan melakukan pendalaman materi terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan maka akan mendukung pencapaian tugas Pusat Penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan.	Pendalaman materi terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu <b>Profesional dan Integritas</b>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
3.	Identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori yang digunakan dalam penulisan Info Singkat</li> <li>- Melakukan pembimbingan dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama</li> </ul>	Catatan daftar regulasi dan teori yang akan di gunakan.	Langkah selanjutnya adalah saya mengidentifikasi regulasi dan teori yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan yang kemudian saya konsultasikan kepada Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama <b>(Komitmen mutu – Akuntabilitas)</b>	Dengan melakukan identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian dalam sepekan maka akan mendukung pencapaian tugas Pusat Penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan.	Identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu <b>Akuntabel, Profesional dan Integritas</b>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
4.	Analisis Penentuan Topik Info Singkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi dan diskusi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti satu kepakaran terkait topik yang akan dipilih dengan melihat dari isu aktual, pendekatan konsep/teori/regulasi serta kemanfaatan bagi dewan.</li> <li>- Penentuan topik Info Singkat</li> </ul>	Laporan analisis isu-isu yang akan dijadikan topik	Setelah diidentifikasi isu-isu tersebut dengan teori dan regulasi yang berkaitan maka dapat ditentukan isu yang akan dijadikan topik dalam penulisan Info Singkat. <b>(Komitmen mutu)</b>	Dengan menentukan topik Info Singkat setelah melalui identifikasi konsep/regulasi/teori maka akan mendukung pencapaian tugas Pusat Penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan.	Penentuan topik dari hasil identifikasi isu-isu yang menjadi perhatian dalam sepekan dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu <b>Profesional dan Integritas</b>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
5.	Penulisan Info Singkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menulis draft awal Info Singkat</li> <li>- Melakukan pembimbingan draft awal Info Singkat</li> <li>- Melakukan revisi draft awal Info Singkat</li> <li>- Pembimbingan akhir penulisan Info Singkat</li> <li>- Info Singkat diterbitkan</li> </ul>	Tulisan dimuat di dalam Info Singkat	<p>Selanjutnya saya menulis draft awal penulisan info singkat berdasarkan hasil diskusi dan pembimbingan sebelumnya</p> <p><b>(komitmen mutu)</b></p> <p>Setelah draft penulisan Info Singkat selesai dibuat saya kembali melakukan pembimbingan terkait teknik penulisan ilmiah Info Singkat dan substansi tulisan dengan Peneliti yang memiliki kepakaran</p>	<p>Melalui penulisan Info Singkat, maka dukungan terhadap Tugas Pusat Penelitian dapat terlaksana dengan lebih optimal, yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.</p> <p>Selain itu, serangkaian proses penulisan Info Singkat juga sejalan dengan fungsi Pusat Penelitian diantaranya : koordinasi dan</p>	<p>Serangkaian penulisan Info Singkat dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu <b>Akuntabel, Profesional dan Integritas</b></p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				<p>sama <b>(Komitmen mutu – Etika Publik)</b></p> <p>Saya akan memperbaiki apabila terdapat revisi dalam penulisan draft Info Singkat dan melakukan pembimbingan draft akhir Info Singkat <b>(komitmen mutu).</b></p> <p>Apabila tulisan sudah dikoreksi redaktur langkah selanjutnya tulisan dimuat ke dalam Info Singkat <b>(Akuntabilitas – Pelayanan Publik)</b></p>	<p>pembinaan terhadap pelaksanaan tugas organisasi di lingkup pusat penelitian, pelaksanaan dukungan evaluasi, penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian.</p>	

## BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

### A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Latihan Dasar CPNS angkatan III Setjen dan BK DPR RI yang dilaksanakan mulai Minggu ke-4 Agustus sampai dengan Minggu ke-1 Oktober 2019 di Griya Sabha Kopo dilakukan melalui serangkaian kegiatan dan materi-materi seperti materi Bela Negara, nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik dan Anti Korupsi), WOG dan selanjutnya dari materi-materi yang diberikan oleh CPNS diaktualisasikan di lingkungan kerja masing-masing CPNS.

Pelaksanaan aktualisasi yang telah direncanakan sebelumnya melalui proposal rancangan aktualisasi yang berisi tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya menghasilkan output dari setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut ini :

**Tabel 4. Kegiatan I (Penelusuran Data dan Informasi)**

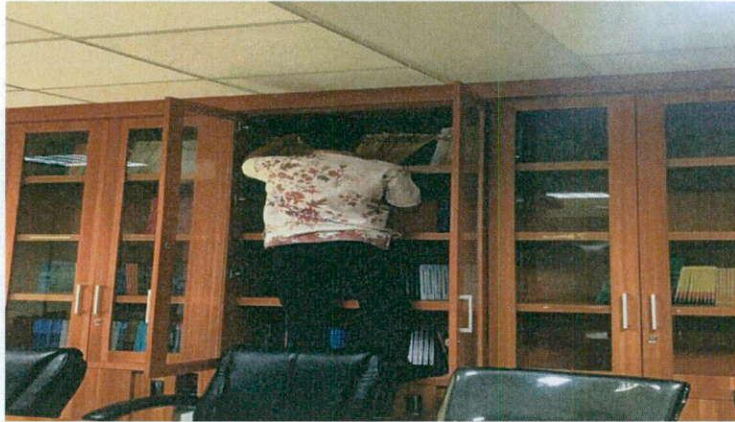
No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
1.	Penelusuran data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencari data Info Singkat sebelumnya sebagai bahan identifikasi masalah dalam penentuan topik Info Singkat</li><li>- Mencari data dan informasi baik melalui</li></ul>	Catatan data dan informasi yang diperlukan

		<p>media cetak maupun elektronik untuk menemukan isu-isu aktual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti satu bidang kepakaran</li> </ul>	
--	--	--	--

Kegiatan pertama yaitu penelusuran data dan informasi yang bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah pada penentuan topik dalam penulisan Info Singkat sebelumnya. Pada kegiatan ini penulis pertama-tama mengumpulkan Info Singkat edisi Januari 2019 sampai Juli 2019. Dalam mengumpulkan Info Singkat tersebut penulis melakukan peminjaman berkas di Tata Usaha Pusat Penelitian.

Gambar 1. Peminjaman Info Singkat di Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian DPR RI





Setelah peminjaman dilakukan, selanjutnya penulis mulai melakukan identifikasi antara judul/topik yang diangkat dalam Info Singkat edisi sebelumnya dengan perkembangan berita pada saat tersebut. Perkembangan berita pada saat menulis Info Singkat sebelumnya di cek oleh penulis melalui indeks berita sepekan yang dapat di akses di website media pemberitaan. Selain mengecek dari media pemberitaan, identifikasi permasalahan dalam penentuan topik Info Singkat yang dilakukan penulis adalah berdiskusi dengan peneliti dan tim redaksi di Pusat Penelitian yang selanjutnya ditemukan permasalahan yang dihadapi peneliti dalam penentuan topik dalam menulis Info Singkat.

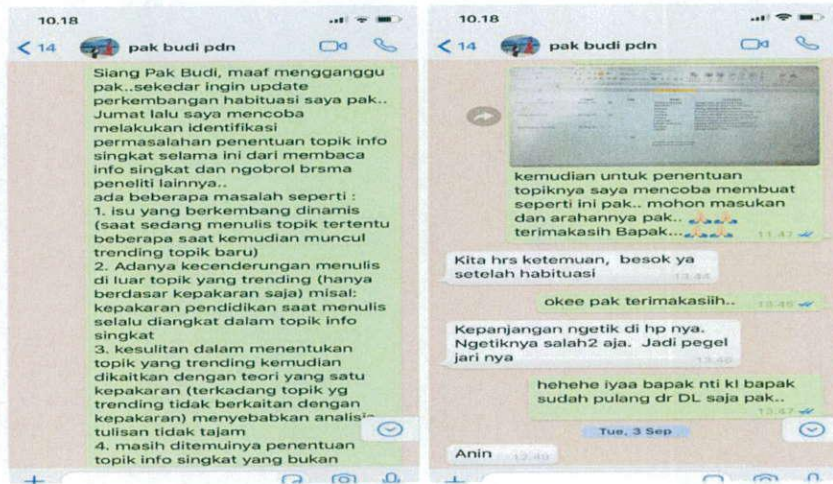
Tahapan kegiatan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penentuan topik Info Singkat sebelumnya. Selain itu, pada tahapan ini pula, penulis perlu mengetahui topik dan judul yang pernah diangkat melalui identifikasi masalah topik penulisan Info Singkat sebelumnya sebagai acuan menentukan judul penulisan untuk menghindari redudansi penulisan dengan topik, judul dan analisis yang sama.

Gambar 2. Indeks Berita untuk Info Singkat Edisi Sebelumnya

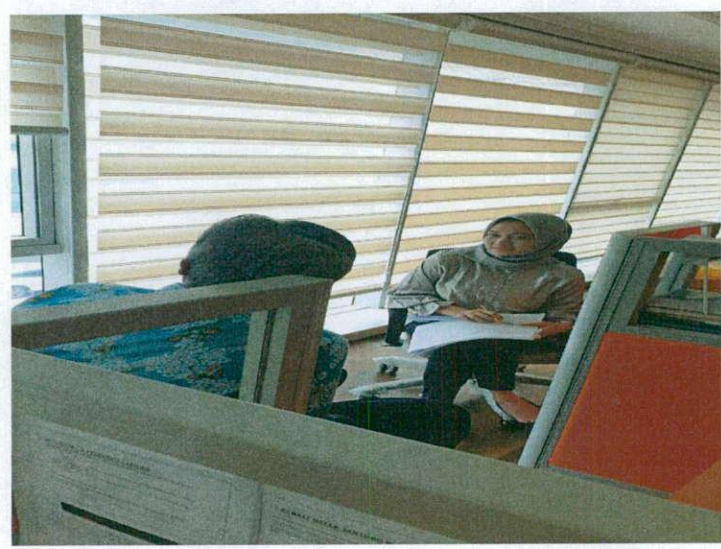


Selanjutnya, setelah diskusi dan penelusuran informasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam penulisan Info Singkat dilakukan, penulis melakukan konsultasi terkait matriks identifikasi masalah dalam penentuan topik Info Singkat dengan mentor. Diskusi dengan mentor dilakukan melalui media whatsapp dan tatap muka. Dilakukan melaluwhatsapp ketika mentor sedang melakukan perjalanan dinas dan dilakukan dengan tatap muka ketika mentor sudah berada di kantor.

Gambar 3. Screenshoot Konsultasi Bersama Mentor



Gambar 4. Konsultasi Tatap Muka Bersama Mentor Pusat Penelitian DPR RI



Gambar 5. Konsultasi Bersama Peneliti Pusat Peneliti DPR RI



Kaitan dengan Nilai-nilai Dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan, serta Nilai Organisasi:

1. Kegiatan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Koordinator Bidang sebagai Mentor dalam kegiatan ini serta dengan Para Peneliti Senior di Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI dilakukan dengan sopan santun dan etika yang baik (**Etika Publik**).
2. Informasi dan data yang diidentifikasi dilakukan dengan mementingkan kualitas yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari narasumber yaitu dari peneliti dan media pemberitaan (**Komitmen Mutu**).
3. Data dan Informasi yang sudah diidentifikasi permasalahan yang ada di dalam penentuan topik Info Singkat kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang dilaporkan kepada Koordinator Bidang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan penulis (**Akuntabilitas**).
4. Penelusuran data dan informasi melibatkan beberapa unsur dari lingkungan pekerjaan, seperti dalam hal pengumpulan Info Singkat edisi sebelumnya dilakukan koordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Penelitian, selanjutnya dalam hal berkonsultasi dan berdiskusi dengan mentor dan peneliti lainnya mengutamakan prinsip (**WoG**) dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.
5. Dalam melakukan penelusuran data dan informasi yang kemudian diidentifikasi permasalahan yang ada, secara sistematis dan objektif sesuai dengan sikap yang harus dimiliki seorang peneliti (**Profesional**).
6. Berprilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam membuat laporan ini sebagai bentuk (**Integritas**).

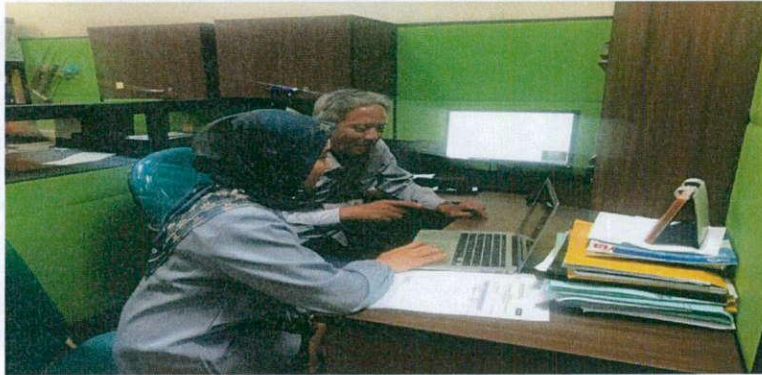
7. Setiap informasi yang didapatkan dalam penentuan topik Info Singkat di dasarkan pada situasi yang benar-benar terjadi pada saat itu di Indonesia, sehingga identifikasi masalah yang dihasilkan adalah benar-benar permasalahan yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan ketepatan analisis sebagai wujud kepedulian terhadap situasi yang terjadi di Indonesia (**Nasionalisme**) .

**Tabel 5. Kegiatan II (Pendalaman Materi)**

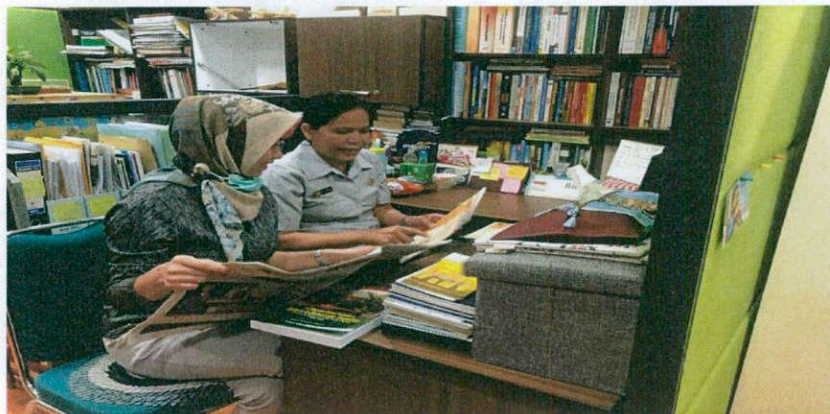
No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
2.	Pendalaman materi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang PDN</li> <li>- Melakukan diskusi dengan Peneliti dengan kepakaran yang sama</li> <li>- Melakukan diskusi dengan salah satu redaksi</li> </ul>	Rencana penulisan Info Singkat berupa kumpulan usulan isu-isu dalam sepekan

Kegiatan yang kedua, penulis melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri (PDN) yang juga selaku mentor serta berdiskusi dengan PDeneliti dengan kepakaran yang sejenis yaitu peneliti PDN kepakaran Administrasi Publik dan salah satu redaksi Info Singkat untuk membahas isu-isu yang terjadi dalam sepekan. Sehingga output dalam tahapan kegiatan ini adalah matriks usulan-usulan isu dari coordinator bidang,penelti satu kepakaran dan salah satu redaksi yang dapat dijadikan topik dalam Info Singkat.

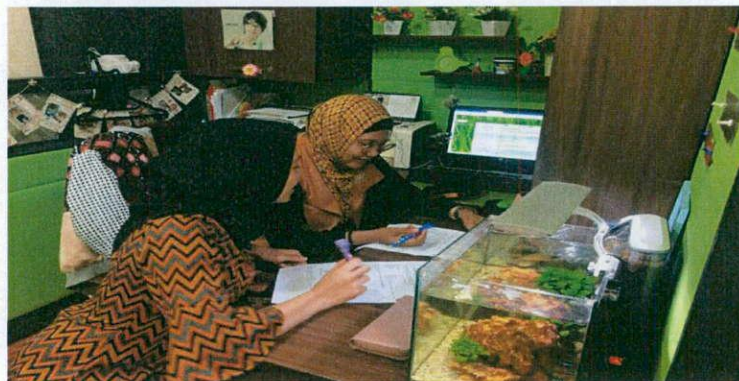
Gambar 6. Diskusi Bersama Mentor



Gambar 7. Diskusi Bersama Peneliti Satu Bidang Kepakaran



Gambar 8. Diskusi Bersama Redaksi Info Singkat



Kaitan dengan nilai-nilai dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan serta nilai organisasi:

1. Kegiatan pada tahap ini dimulai dengan melakukan diskusi kepada koordinator bidang , Peneliti satu bidang kepakaran serta salah satu redaksi untuk meminta masukan terkait isu yang terjadi dalam sepekan yang memungkinkan untuk dijadikan topik Info Singkat. Diskusi ini juga memberi pemahaman kepada penulis terkait batasan-batasan yang ditulis sesuai dengan kepakarannya sehingga tidak berbenturan dengan kepakaran lainnya (**Etika Publik**).
2. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan untuk menjaga isu yang nantinya di angkat menjadi topik Info Singkat adalah isu yang aktual dan benar-benar menjadi urgensi dalam pembahasan kedewanan (**Komitmen Mutu**).
3. Dalam melihat isu-isu dalam penulisan Info Singkat didasarkan pada permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan diharapkan memberikan alternative solusi yang dapat dijadikan masukan bagi Dewan terhadap permasalahan yang terjadi demi kepentingan negara (**Nasionalisme**).
4. Setelah usulan-usulan isu masuk langkah selanjutnya penulis membuat laporan usulan isu yang disampaikan oleh coordinator bidang, peneliti satu kepakaran dan redaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan penulis (**Akuntabilitas**).
5. Pencarian referensi isu dilakukan pada bagian perpustakaan DPR RI, maupun pada bidang lainnya menggunakan prinsip (**WoG**) dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dengan bidang lain agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.
6. Isu-isu yang menjadi usulan adalah benar-benar isu yang terjadi

dalam sepekan dan akan dikaji dengan teori dari kepakaran penulis (**Profesional**).

7. Berprilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam membuat laporan ini sebagai bentuk (**Integritas**)

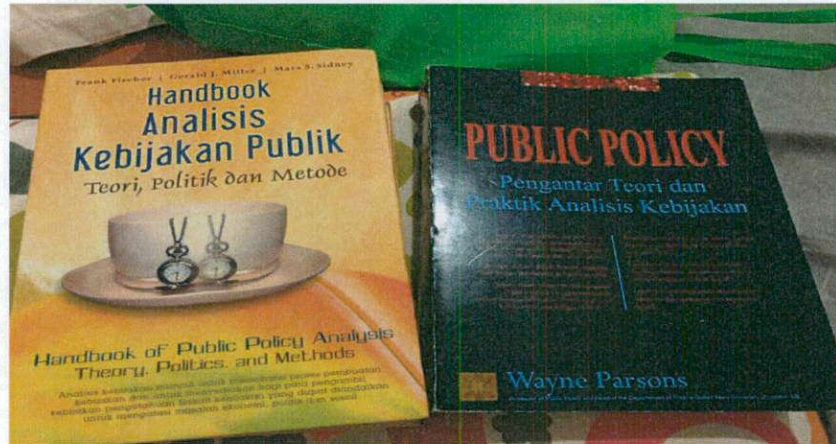
**Tabel 6. Kegiatan III (Identifikasi Pendekatan Konsep/Regulasi/Teori)**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
3.	Identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori yang digunakan dalam penulisan Info Singkat</li> <li>- Melakukan pembimbingan dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama</li> </ul>	Catatan daftar regulasi dan teori yang akan di gunakan.

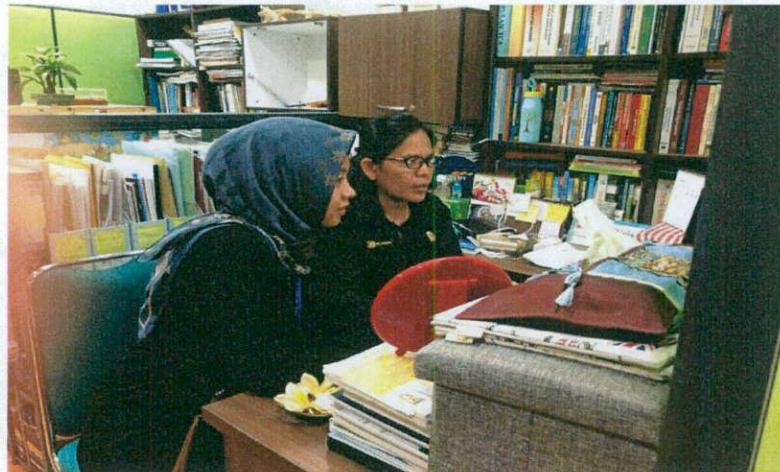
Kegiatan ketiga penulis melakukan identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori. Pada tahapan ini, penulis mulai mencari teori/konsep/regulasi yang berkaitan dengan isu-isu yang terpilih sebelumnya dengan meminjam buku dari peneliti satu bidang kepakaran, perpustakaan atau dengan mencari secara online jurnal-jurnal yang relevan. Selanjutnya penulis berdiskusi dengan peneliti satu bidang kepakaran terkait teori-teori yang didapat serta memungkinkan untuk digunakan dalam menganalisis isu. Hal ini dilakukan agar dalam menulis Info Singkat, sudah mendapatkan gambaran teori/konsep/regulasi apa yang reakan digunakan. Identifikasi teori/konsep/regulasi dapat memudahkan penulis pada saat nantinya mulai menulis Info Singkat

karena sudah memiliki referensi-referensi materi yang dibutuhkan sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Gambar 9. Kegiatan Telaah Pustaka



Gambar 10. Pembimbingan dengan Peneliti Satu Bidang Kepakaran



Kaitan dengan nilai-nilai dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan serta nilai organisasi:

1. Kegiatan pada tahap ini dimulai penulis mulai mencari referensi konsep/teori/regulasi yang relevan dengan isu-isu yang terpilih sebelumnya dengan meminjam buku dari perpustakaan, meminjam pada peneliti lainnya atau mencari jurnal-jurnal online yang relevan (**Komitmen mutu**).
2. Selanjutnya dari teori/konsep/regulasi yang didapatkan penulis melakukan diskusi kepada Peneliti satu bidang kepakaran yang memungkinkan teori tersebut digunakan dalam penulisan Info Singkat nantinya. (**Etika Publik**).
3. Dalam mengidentifikasi teori/konsep/regulasi dikaitkan berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan diharapkan memberikan alternative solusi yang dapat dijadikan masukan bagi Dewan terhadap permasalahan yang terjadi demi kepentingan negara (**Nasionalisme**).
4. Hasil identifikasi teori/konsep/regulasi yang telah dilakukan dilaporkan kepada coordinator bidang serta peneliti satu bidang kepakaran (**Akuntabilitas**).
5. Pencarian referensi isu dilakukan pada bagian perpustakaan DPR RI (**WoG**) dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dengan bidang lain agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.
6. Teori/konsep/regulasi yang digunakan adalah benar-benar teori/konsep/regulasi dari kepakaran penulis, sehingga saat menulis Info Singkat perseptif dalam menganalisis permasalahan adalah dari perspektif kepakaran penulis (**Profesional**).
7. Berprilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran,

etika dan moral dalam membuat laporan ini (**Integritas**).

**Tabel 7. Kegiatan IV (Analisis Penentuan Topik Info Singkat)**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
4.	Analisis Penentuan Topik Info Singkat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultasi dan diskusi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti satu kepakaran terkait topik yang akan dipilih dengan melihat dari isu aktual, pendekatan konsep/teori/regulasi serta kemanfaatan bagi dewan.</li><li>- Penentuan topik Info Singkat</li></ul>	Laporan analisis isu-isu yang akan dijadikan topik

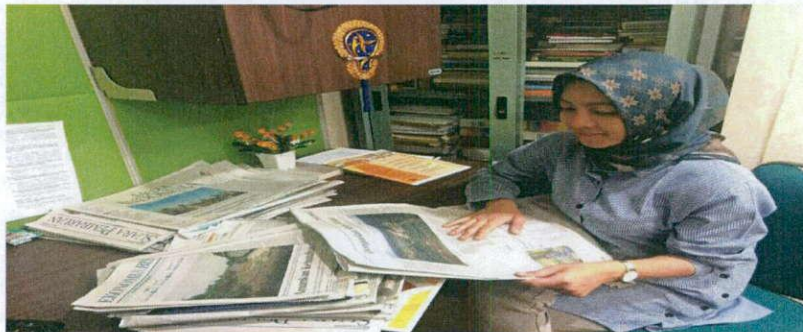
Tahapan keempat penulis mulai melakukan analisis penentuan topik *Info Singkat* dengan cara menelusuri isu-isu sepekan di media cetak, yang kemudian dilakukan pen-*telly*-an untuk benar-benar mendapatkan topik yang aktual. Metode *telly* adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa symbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka yang berjumlah cukup banyak. Pen-*telly*-an sangat bermanfaat sebagai alat yang dapat menuntun kita lebih objektif dalam menentukan topik yang aktual. Hal ini dikarenakan isu-isu dalam sepekan bergerak sangat dinamis, sehingga sewaktu-waktu isu yang kita anggap aktual dan menjadi perhatian masyarakat dapat tergantikan oleh isu lainnya.

Selanjutnya Isu yang akhirnya terpilih akan ditentukan menggunakan teori/konsep/regulasi apa sesuai dengan identifikasi teori/konsep/regulasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

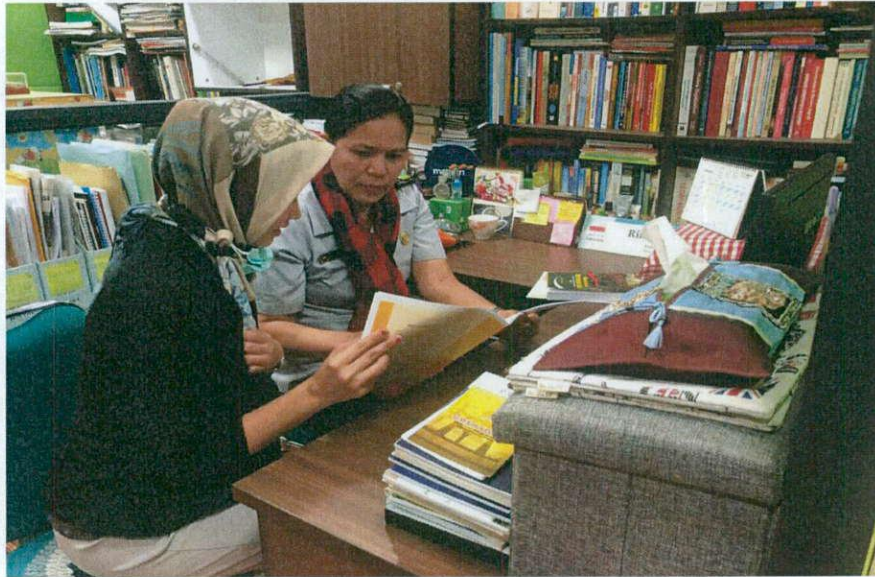
Gambar 11. Peminjaman Koran di Perpustakaan DPR RI



Gambar 12. Membaca Koran



Gambar 13. Konsultasi Bersama Peneliti Satu Bidang Kepakaran



Gambar 14. Konsultasi Bersama Kordinator Bidang PDN



Kaitan dengan nilai-nilai dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan serta nilai organisasi:

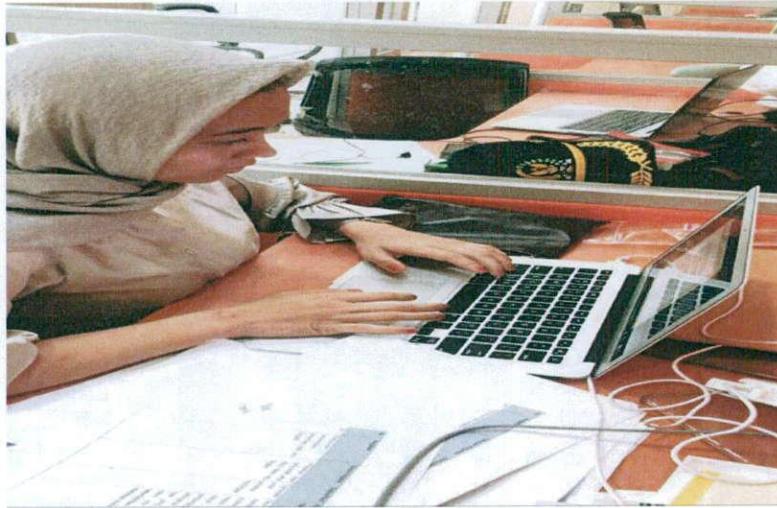
1. Kegiatan pada tahap ini dimulai penulis mulai menelusuri isu-isu yang terjadi dalam sepekan melalui media pemberitaan yang kemudian dilakukan *pen-telly-an* untuk menjaga objektivitas isu yang terpilih (**Komitmen mutu**).
2. Selanjutnya dari hasil penelusuran dan analisis tersebut penulis melakukan diskusi dengan coordinator bidang dan peneliti satu bidang kepakaran terkait isu yang teroilih untuk dijadikan topik penulisan Info Singkat (**Etika Publik**) .
3. Isu yang terpilih merupakan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan diharapkan memberikan alternative solusi yang dapat dijadikan masukan bagi Dewan terhadap permasalahan yang terjadi demi kepentingan negara (**Nasionalisme**).
4. Hasil penelusuran dan analisis isu di media cetak selama sepekan dilaporkan kepada coordinator bidang serta peneliti satu bidang kepakaran (**Akuntabilitaas**).
5. Penelusuran isu-isu sepekan dilakukan dengan membaca media koran yang dapat dipinjam di bagian perpustakaan DPR RI (**WoG**) yaitu meminjam koran dalam sepekan, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dengan bidang lain agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.
6. Penentuan topik dilakukan dengan objektif yaitu dengan metode *pen-telly-an* dari isu-isu yang berkembang selama sepekan serta memiliki kemanfaatan bagi dewan (**Profesional**).
7. Dalam menentukan topik Info Singkat, penulis bebas dari kepentingan-kepentingan dari luar yang dapat mempengaruhi objektivitas penulis dalam memilih topik (**Integritas**).

**Tabel 8. Kegiatan V (Penulisan Info Singkat)**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
5.	Penulisan Info Singkat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menulis draft awal Info Singkat</li><li>- Melakukan pembimbingan draft awal Info Singkat</li><li>- Melakukan revisi draft awal Info Singkat</li><li>- Pembimbingan akhir penulisan Info Singkat</li><li>- Info Singkat diterbitkan</li></ul>	Tulisan dimuat di dalam Info Singkat

Tahapan terakhir adalah penulis mulai menulis draft awal Info Singkat yang selanjutnya dilakukan pembimbingan kepada Peneliti satu bidang keparakan. Setelah diberikan koreksi oleh peneliti satu bidang keparakan, selanjutnya penulis melakukan revisi atas masukan yang diberikan. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pembimbingan dengan peneliti satu bidang keparakan, penulis mengirim draft Info Singkat kepada redaksi untuk dikoreksi oleh redaksi. Setelah redaksi melakukan koreksi terhadap masukan-masukan perbaikan untuk tulisan Info Singkat. Pada tahap ini penulis berdiskusi kembali dengan peneliti satu bidang keparakan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari redaksi. Setelah perbaikan selesai dilakukan, Info Singkat dikirimkan kembali ke redaksi untuk selanjutnya diterbitkan.

Gambar 15. Menulis Info Singkat



Gambar 16. Bimbingan Info Singkat Peneliti Satu Kepakaran

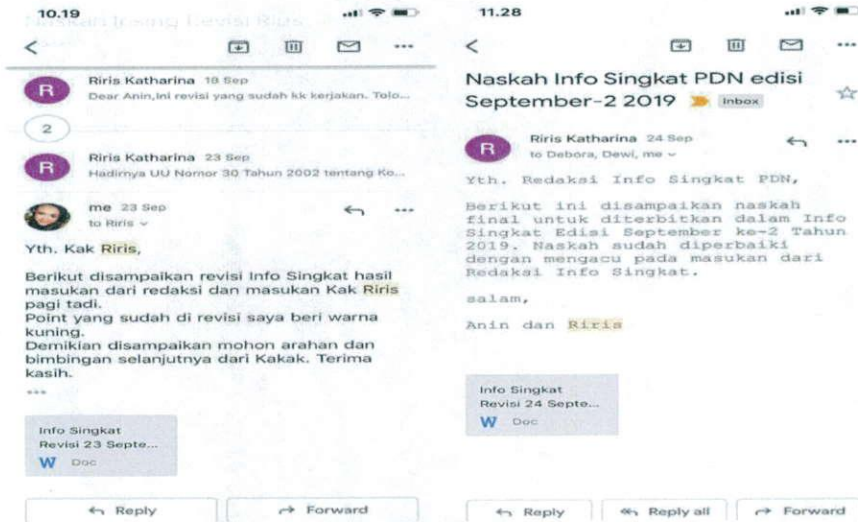




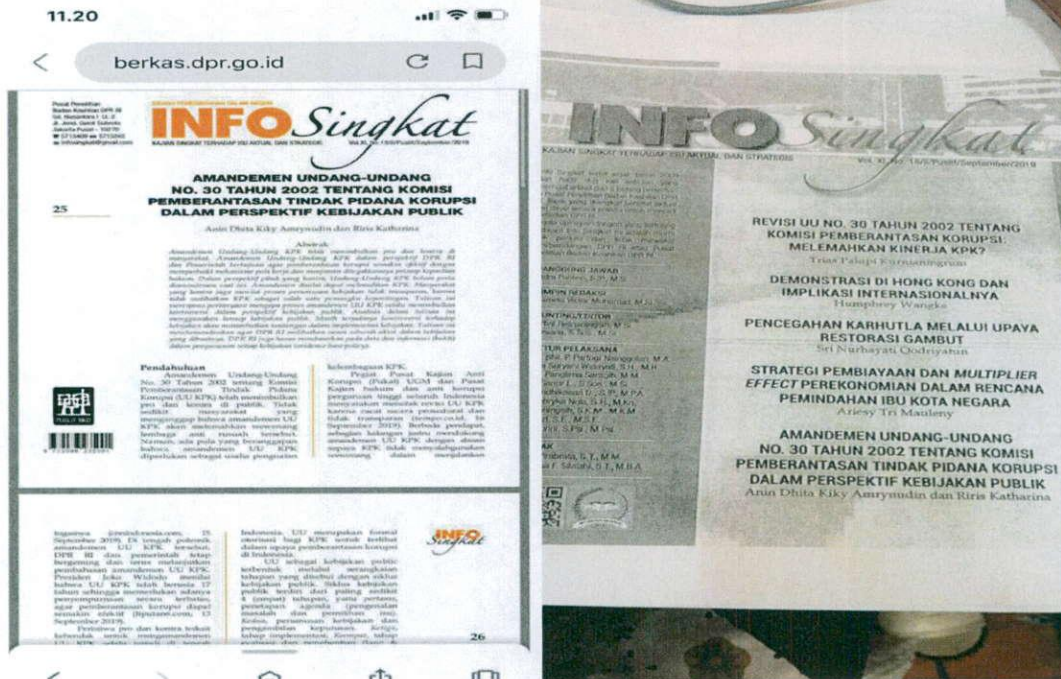
Gambar 17. Masukan dari Redaksi Info Singkat



Gambar 18. Draft Akhir Info Singkat Dikirim Ke Redaksi



Gambar 19. Info Singkat Diterbitkan



Kaitan dengan nilai-nilai dasar ANEKA, Peran dan Kedudukan serta nilai organisasi:

1. Kegiatan pada tahap ini penulis mulai menulis draf awal Info Singkat berdasarkan topik yang dipilih melalui serangkaian tahapan yang ilmiah, sistematis dan objektif (**Komitmen mutu**).
2. Selanjutnya draft Info Singkat yang telah dibuat dikonsultasikan kepada Peneliti satu bidang kepakaran untuk mendapatkan masukan (**Etika Publik**).
3. Produk Info Singkat merupakan hasil kajian ilmiah yang dapat sebagai masukan bagi anggota dewan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi bagi kepentingan negara (**Nasionalisme**).
4. Info Singkat yang telah di tulis selanjutnya dikirimkan kepada redaksi untuk selanjutnya diberi masukan dan diterbitkan (**Akuntabilitas**).
5. Penulisan Info Singkat membutuhkan berbagai referensi bacaan sehingga penulis berhubungan dengan perpustakaan DPR RI (**WoG**) untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan.
6. Penulisan Info Singkat berpegangan pada perspektif teori atau konsep kepakaran yang dimiliki (**Profesional**).
7. Dalam menulis Info Singkat, penulis bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas penulis dalam menulis Info Singkat (**Integritas**).

## **B. Stakeholder**

Stakeholder dalam isu yang diangkat pada rencana proyek perubahan ini adalah Kepala Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, para peneliti dan calon peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang

memiliki memiliki tugas untuk membuat Info Singkat yang merupakan salah satu produk Pusat Penelitian yang diterbitkan secara berkala.

### **C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala**

Kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan ini adalah waktu , hal ini dikarenakan proyek habituasi ini dilakukan dalam rentang waktu yang relative singkat sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Namun dapat diatasi dengan menerapkan manajemen waktu.

### **D. Analisis Dampak**

#### **1. Hasil Inisiatif**

Dampak yang akan dihasilkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini yaitu :

##### **a. Level Individu**

Penyusunan Metode Identifikasi Pemilihan Topik Penulisan Info Singkat dapat memberikan pemahaman dalam menentukan topik penulisan Info Singkat sehingga tulisan yang termuat sesuai dengan standar yang diharapkan.

##### **b. Level Unit Organisasi**

Pelaksanaan aktualisasi metode identifikasi pemilihan topik penulisan Info Singkat telah mendukung salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian.

#### **2. Nilai Dasar ANEKA**

Nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme , Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi menjadi hal yang penting untuk selalu diterapkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PNS. Apabila nilai-nilai ini tidak diimplementasikan dalam setiap kegiatan maka

yang terjadi adalah kegiatan tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan gagal. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan selalu membutuhkan elemen akuntabilitas sebagai bukti dan evaluasi bahwa suatu kegiatan telah dijalankan dan dapat dievaluasi untuk diberikan penilaian dan masukan untuk kegiatan tersebut. Nasionalisme perlu ditanamkan agar segala kegiatan yang dibuat berlandaskan pada rasa kecintaan pada Indonesia dan semata-mata untuk kepentingan publik bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Etika Publik juga diperlukan dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas dan mengedepankan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan (dalam hal ini anggota dewan). Selanjutnya adalah komitmen mutu yang berarti unit kerja selalu berusaha meningkatkan mutu produknya untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan pelanggan. Selanjutnya anti korupsi artinya dalam setiap kegiatan maupun produk yang dikeluarkan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi maupun golongan.

## E. RENCANA JADWAL KEGIATAN

Tabel 9. Rencana Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER
		Week					week				week
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I
1.	<b>Penelusuran data dan Informasi</b>										
	a. Mencari data Info Singkat sebelumnya sebagai bahan identifikasi masalah dalam penentuan topik Info Singkat										
	b. Mencari data dan informasi baik melalui buku, media cetak maupun elektronik (website)										
	c. Konsultasi kepada Koordinator Bidang dan Peneliti Satu kepakaran terkait data dan informasi yang didapatkan										
2.	<b>Pendalaman materi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama</b>										
	a. Melakukan diskusi dengan Koordinator Bidang PDN										
	b. Melakukan diskusi dengan Peneliti dengan kepakaran yang sama										
	c. Melakukan diskusi dengan salah satu redaksi										
3.	<b>Identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori</b>										
	a. Mengidentifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori yang digunakan dalam penulisan Info Singkat										
	b. Melakukan pembimbingan dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama										

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	AGUSTUS					SEPTEMBER				OKTOBER
		Week					week				week
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I
4.	<b>Analisis Penentuan Topik Info Singkat dan Penyusunan rekomendasi penentuan topik Info Singkat</b>										
	a. Berdiskusi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti satu kepakaran										
	b. Penentuan Topik Info Singkat										
5.	<b>Penulisan Info Singkat</b>										
	a. Menulis draft awal Info Singkat										
	b. Melakukan pembimbingan draft awal Info Singkat										
	c. Melakukan revisi draft awal Info Singkat										
	d. Pembimbingan akhir penulisan Info Singkat										
	e. Info Singkat diterbitkan										

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Menjawab isu “Sulitnya menentukan topik dalam penulisan Info Singkat”, peserta telah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan mulai Minggu ke-4 Agustus sampai dengan Minggu ke-1 Oktober 2019. Kegiatan aktualisasi ini menghasilkan output berupa *leaflet* “Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat”. Secara umum, kegiatan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, hanya beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan arahan atasan dan perubahan jadwal kegiatan dikarenakan terdapat hal-hal situasional yang harus segera dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada lima nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Serta Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan *Whole of Government (WoG)*. Adapun kegiatan aktualisasi sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan 1 : Penelusuran data dan informasi**

Tahapan ini mencakup konsultasi dan berdiskusi dengan Koordinator Bidang sebagai Mentor dalam kegiatan ini serta dengan Para Peneliti Senior di Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI yang dilakukan dengan menedepankan prinsip kesopanan (**Etika Publik**). Selanjutnya penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang dilakukan secara teliti dan benar-benar hasil dari komunikasi dengan para peneliti lainnya (**Komitmen Mutu dan WoG**). Pada tahapan ini penulis melaporkan output yaitu berupa catatan permasalahan dalam pemilihan topik Info Singkat kepada Mentor (**Akuntabilitas**). Selanjutnya peneliti dalam melakukan penelusuran data

dilandaskan pada prinsip (**Profesional**) yaitu melalui tahapan yang sistematis sehingga harus berpegang pada nilai kejujuran, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam membuat laporan ini sebagai bentuk (**Integritas**). Rangkaian kegiatan ini mewujudkan rasa peduli terhadap permasalahan yang sedang dihadapi negara dengan bersumbangsih melalui kajian singkat (**Nasionalisme**).

## 2. Kegiatan 2 : Pendalaman materi dengan Koordinator Bidang dan Peneliti dengan kepakaran yang sama

Diskusi ini memberi pemahaman kepada penulis terkait batasan-batasan yang ditulis sesuai dengan kepakarannya sehingga tidak berbenturan dengan kepakaran lainnya (**Etika Publik**). Hal ini dilakukan untuk menjaga isu yang nantinya di angkat menjadi topik Info Singkat adalah isu yang aktual dan benar-benar menjadi urgensi dalam pembahasan kedewanan (**Komitmen Mutu**). Isu-isu dalam penulisan Info Singkat didasarkan pada permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan membutuhkan kajian sebagai masukan bagi anggota dewan (**Nasionalisme**).

Selanjutnya penulis membuat laporan usulan isu yang disampaikan oleh coordinator bidang, peneliti satu kepakaran dan redaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan penulis (**Akuntabilitas**). Pencarian referensi isu dilakukan pada bagian perpustakaan DPR RI, maupun pada bidang lainnya menggunakan prinsip (**WoG**) . Isu-isu yang menjadi usulan adalah benar-benar isu yang terjadi dalam sepekan dan akan dikaji dengan teori dari kepakaran penulis (**Profesional**). Berprilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam membuat laporan ini sebagai bentuk (**Integritas**).

### 3. Kegiatan 3 : Identifikasi pendekatan konsep/regulasi/teori

Kegiatan pada tahap ini penulis mencari referensi konsep/teori/regulasi yang relevan dengan isu-isu yang terpilih sebelumnya dengan meminjam buku dari perpustakaan, meminjam pada peneliti lainnya atau mencari jurnal-jurnal online yang relevan (**Komitmen mutu**). Selanjutnya dari teori/konsep/regulasi yang didapatkan penulis melakukan diskusi kepada Peneliti satu bidang kepakaran yang memungkinkan teori tersebut digunakan dalam penulisan Info Singkat nantinya. (**Etika Publik**). Teori/konsep/regulasi dikaitkan berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan diharapkan memberikan alternative solusi yang dapat dijadikan masukan bagi Dewan terhadap permasalahan yang terjadi demi kepentingan negara (**Nasionalisme**).

Selanjutnya, hasil identifikasi teori/konsep/regulasi yang telah dilakukan dilaporkan kepada coordinator bidang serta peneliti satu bidang kepakaran (**Akuntabilitas**). Pencarian referensi isu dilakukan pada bagian perpustakaan DPR RI (**WoG**) dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dengan bidang lain agar tercipta suatu keselarasan untuk mencapai output yang diinginkan.

Teori/konsep/regulasi yang digunakan adalah benar-benar teori/konsep/regulasi dari kepakaran penulis, sehingga saat menulis Info Singkat perseptif dalam menganalisis permasalahan adalah dari perspektif kepakaran penulis (**Profesional**). Pada tahapan ini penulis memegang prinsip memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika dan moral dalam membuat laporan ini sebagai bentuk (**Integritas**).

#### 4. Kegiatan 4 : Analisis Penentuan Topik Info Singkat dan Penyusunan rekomendasi penentuan topik Info Singkat

Kegiatan pada tahap ini dimulai penulis mulai menelusuri isu-isu yang terjadi dalam sepekan melalui media pemberitaan yang kemudian dilakukan *pen-telly-an* untuk menjaga objektivitas isu yang terpilih (**Komitmen mutu**). Selanjutnya dari hasil penelusuran dan analisis tersebut penulis melakukan diskusi dengan coordinator bidang dan peneliti satu bidang kepakaran terkait isu yang terpilih untuk dijadikan topik penulisan Info Singkat (**Etika Publik**). Isu yang terpilih merupakan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia dan diharapkan memberikan alternative solusi yang dapat dijadikan masukan bagi Dewan terhadap permasalahan yang terjadi demi kepentingan negara (**Nasionalisme**).

Hasil penelusuran dan analisis isu di media cetak selama sepekan dilaporkan kepada coordinator bidang serta peneliti satu bidang kepakaran (**Akuntabilitas**). Penelusuran isu-isu sepekan dilakukan dengan membaca media koran yang dapat dipinjam di bagian perpustakaan DPR RI (**WoG**). Penentuan topik dilakukan dengan objektif yaitu dengan metode *pen-telly-an* dari isu-isu yang berkembang selama sepekan serta memiliki kemanfaatan bagi dewan (**Profesional**). Dalam menentukan topik Info Singkat, penulis bebas dari kepentingan-kepentingan dari luar yang dapat mempengaruhi objektivitas penulis dalam memilih topik (**Integritas**).

#### 5. Kegiatan 5 : Penulisan Info Singkat

Kegiatan pada tahap ini penulis mulai menulis draf awal

Info Singkat berdasarkan topik yang dipilih melalui serangkaian tahapan yang ilmiah, sistematis dan objektif (**Komitmen mutu**). Selanjutnya draft Info Singkat yang telah dibuat dikonsultasikan kepada Peneliti satu bidang kepakaran untuk mendapatkan masukan (**Etika Publik**). Produk Info Singkat merupakan hasil kajian ilmiah yang dapat sebagai masukan bagi anggota dewan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi bagi kepentingan negara (**Nasionalisme**).

Info Singkat yang telah di tulis selanjutnya dikirimkan kepada redaksi untuk selanjutnya diberi masukan dan diterbitkan (**Akuntabilitas**). Penulisan Info Singkat membutuhkan berbagai referensi bacaan sehingga penulis berhubungan dengan perpustakaan DPR RI (**WoG**) untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan. Penulisan Info Singkat berpegangan pada perspektif teori atau konsep kepakaran yang dimiliki (**Profesional**). Dalam menulis Info Singkat, penulis bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas penulis dalam menulis Info Singkat (**Integritas**).

## **B. SARAN**

Kegiatan ini merupakan inovasi yang memudahkan peneliti dalam menentukan topik Info Singkat. Selain memudahkan, metode ini juga merupakan suatu gagasan yang sistematis dan ilmiah dalam menentukan topik Info Singkat sehingga produk yang dihasilkan objektif, menghindari redudansi tulisan yang pernah ditulis sebelumnya serta sesuai dengan kepakaran dan kemanfaatan bagi dewan.

Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi visi misi organisasi serta

kontribusi terhadap penguatan nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan program yang telah dibangun dapat dilanjutkan secara berkesinambungan dan senantiasa selalu berlandaskan pada nilai-nilai dasar ANEKA sehingga menjadikan ASN yang profesional dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Output Tahapan Kegiatan I**

<b>FORM. 1 Identifikasi Masalah dalam Penentuan Topik Info Singkat Sebelumnya</b>			
<b>No.</b>	<b>Judul Info Singkat</b>	<b>su Media Cetak</b>	<b>Kedekatan dengan Isu</b>
1.	Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 di Daerah Bencana Alam (Vol.XI,No.01/I/Puslit/Januari/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoax Surat Suara Tercoblos</li> <li>- Jelang Pemilu 2019</li> </ul>	Dekat, karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
2.	Kebijakan Penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 (Vol.XI,No.02/II/Puslit/Januari/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidato Kebangsaan Prabowo</li> <li>- Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir</li> </ul>	Jauh, karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat jauh dari Isu yang ada di media cetak
3.	Debat Calon Presiden dan Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilpres tahun 2019 (Vol.XI,No.03/I/Puslit/Februari/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penahanan Ahmad Dhani terkait ujaran kebencian</li> <li>- Debat Calon Presiden</li> <li>- Penganiayaan pegawai KPK</li> <li>- Dugaan suap pegawai Kemenpora</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
4.	Polemik Elektronik WNA Menjelang Pemilu dan Reformasi Administrasi Kependudukan (Vol.XI,No.05/I/Puslit/Maret/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penangkapan Robertus Robet dugaan penghinaan penguasa</li> <li>- KTP Elektronik WNA yang tercatat dalam DPT</li> <li>- Pengenaan tarif bagasi pesawat</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
5.	Permasalahan Kelembagaan Demokrasi dalam Partai Politik (Vol.XI,No.06/II/Puslit/Maret/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jual – Beli Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama</li> <li>- Serangan terror di dua masjid Selandia Baru</li> <li>- Jelang Pemilu 2019</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
6.	Pelanggaran Penayangan Iklan Kampanye Parpol pada Pemilu 2019 (Vol.XI,No.07/I/Puslit/April/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jelang Pemilu 2019</li> <li>- Kenaikan harga tiket pesawat kelas</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat

		ekonomi	dengan Isu yang ada di media cetak
7.	Hasil Survey Elektabilitas dan Swing Voters dalam Pemilihan Presiden 2019 (Vol.XI,No.08/II/Puslit/April/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pemilu 2019</li> <li>- Masalah pemilu di Sidney</li> <li>- Bullying terhadap Audrey</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
8.	Jaminan Pemerintah Terhadap Anggota KPPS Dalam Pemilu Serentak 2019 (Vol.XI,No.09/I/Puslit/Mei/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasca Pemilu 2019</li> <li>- Ratusan Anggota KPPS meninggal dunia saat Pelaksanaan Pemilu</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
9.	Wacana Penggunaan E-Voting Pada Pemilu (Vol.XI,No.10/II/Puslit/Mei/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasca Pemilu 2019</li> <li>- Rusuh Lapas Langkat</li> <li>- Kerusuhan Pasca Pemilu</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
10.	Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 (Vol.XI,No.11/I/Puslit/Juni/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sidang Perdana Sengketa Pemilu di MK</li> <li>- Mudik Lebaran</li> <li>- Dugaan Makar</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
11.	Maladministrasi dalam penerbitan IMB Reklamasi Teluk Jakarta (Vol.XI,No.12/II/Puslit/Juni/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kericuhan usai Pemilu</li> <li>- Penahanan Kivlan Zen</li> <li>- Penerbitan IMB Reklamasi Teluk Jakarta</li> <li>- Putusan MK terkait hasil Pemilu</li> </ul>	Dekat , karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak
12.	Rekonsiliasi Politik dan Pembentukan Kabinet Baru Periode 2019 (Vol.XI,No.13/I/Puslit/Juni/2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru</li> <li>- Jokowi hadiri KTT G-20</li> <li>- Pasca Putusan MK Hasil Pemilu Presiden-wakil presiden</li> </ul>	Dekat, karena isu yang ditulis di dalam Info Singkat dekat dengan Isu yang ada di media cetak

## Lampiran 2. Output Tahapan Kegiatan II

FORM 2. USULAN ISU			
No.	Nama	Usulan Isu	Alasan
1.	Ahmad Budiman (Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri)	Revisi Undang-Undang KPK	Isu aktual dan sedang menjadi pembahasan dewan
2.	Riris Katharina (Peneliti Satu Kepakaran Administrasi Publik)	Revisi Undang-Undang KPK dengan membahas pada polemik yang terjadi pada revisi tersebut	Isu aktual dan sedang menjadi pembahasan dewan
3.	Dewi Sendhikasari (Redaksi)	Revisi Undang-Undang KPK Yang dibahas pada urgensi.	Sedang menjadi trending di media massa

### Lampiran 3. Output Tahapan Kegiatan Ketiga

FORM 3. IDENTIFIKASI PENDEKATAN KONSEP / REGULASI / TEORI			
No.	Isu sepekan	Teori / Regulasi	Keterangan
1.	Revisi Undang – Undang KPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Kebijakan Publik (Rian T. Nugroho)</li> <li>2. Teori evaluasi kebijakan publik (Jann &amp; Wegrich)</li> <li>3. Teori Formulasi Kebijakan Publik (Schneider &amp; Ingram)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU sebagai Bentuk kebijakan public</li> <li>b. Evaluasi kebijakan public menghasilkan pola beragam</li> <li>c. Aktor dalam formulasi kebijakan publik</li> </ol>
2.	Seleksi Calon Pimpinan KPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Auxiliary state</li> <li>2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Lembaga anti korupsi (Alain Doig, David Watt, dan Robert Willian)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ahmad Basarah : Auxiliary agency menjadi konsekuensi dari penerapan distribution of power</li> <li>b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Lembaga anti korupsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen nasional yang baik</li> <li>- Anggaran memadai</li> <li>- SDM Profesional</li> <li>- Landasan yuridis yang memberikan kewenangan secara menyeluruh kepada Lembaga anti korupsi</li> </ul> </li> </ol>
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dan Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Kapabilitas Organisasi (The Australian Public Commission)</li> </ol>	Kombinasi keahlian SDM dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki SDM nya, sehingga kapabilitas organisasi menyangkut system dan proses nya.

### Lampiran 4. Output Tahapan Kegiatan Keempat

FORM 4. DENTIFIKASI PENENTUAN TOPIK INFO SINGKAT					
No.	Isu	Telly	Jumlah	Surat Kabar	Tanggal Terbit
1.	Revisi Undang-Undang KPK	IIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII	30	Tempo	9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
				Republika	9,10,11,12,13,14,16
				Pikiran Rakyat	9,10,11,12
				Kompas	9,11,13,14,15,16
				Media Indonesia	9,10,11,13,14,16
2.	Seleksi Calon Pimpinan KPK	IIII IIIII II	12	Republika	9,10,11,14,16
				Media Indonesia	10,11,14
				Tempo	11,13,14,15
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan dan Riau	IIII IIIII IIIII IIIII	20	Republika	9,10,11,14,16
				Kompas	9,10,11,13,14,15,16
				Pikiran Rakyat	12
				Media Indonesia	14,16

**Lampiran 5. Output Produk Info Singkat**

(halaman berikutnya)

# INFO Singkat

KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS

Vol. XI, No. 18/II/Puslit/September/2019

Info Singkat terbit sejak tahun 2009 dan hadir dua kali sebulan yang memuat artikel dari 5 bidang penelitian di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Topik yang diangkat bersifat aktual dan dikaji secara praktis untuk menjadi perhatian DPR RI.

Segala opini/pandangan yang tertuang di dalam Info Singkat ini adalah murni milik penulis dan tidak mewakili opini/pandangan DPR RI atau Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.

#### **PENYUNTING/EDITOR**

Dr. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Prof. Dr. phil. P. Partogi Nainggolan, M.A.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.

Debora Sanur L., S.Sos., M.Si.

Dewi Sendhikasari D., S.IP., M.P.A.

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

#### **TATA LETAK**

Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sahat Aditua F. Silalahi, S.T., M.B.A.



## **REVISI UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: MELEMAHKAN KINERJA KPK?**

Trias Palupi Kurnianingrum

## **DEMONSTRASI DI HONG KONG DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA**

Humphrey Wangke

## **PENCEGAHAN KARHUTLA MELALUI UPAYA RESTORASI GAMBUT**

Sri Nurhayati Qodriyatun

## **STRATEGI PEMBIAYAAN DAN MULTIPLIER EFFECT PEREKONOMIAN DALAM RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

Ariesy Tri Mauleny

## **AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina

## AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina

### Abstrak

*Amandemen Undang-Undang KPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Amandemen Undang-Undang KPK dalam perspektif DPR RI dan Pemerintah bertujuan agar pemberantasan korupsi semakin efektif dengan memperbaiki mekanisme pola kerja dan menjamin ditegakkannya prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif pihak yang kontra, Undang-Undang KPK belum perlu diamendemen saat ini. Amandemen dinilai dapat melemahkan KPK. Masyarakat yang kontra juga menilai proses perumusan kebijakan tidak transparan, karena tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan. Tulisan ini merespons pertanyaan mengapa proses amandemen UU KPK selalu menimbulkan kontroversi dalam perspektif kebijakan publik. Analisis dalam tulisan ini menggunakan konsep kebijakan publik. Masih terjadinya kontroversi terhadap kebijakan akan menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melibatkan suara seluruh aktor dalam kebijakan yang dibuatnya. DPR RI juga harus mendasarkan pada data dan informasi (bukti) dalam penyusunan setiap kebijakan (evidence base policy).*

### Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah menimbulkan pro dan kontra di publik. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa amandemen UU KPK akan melemahkan wewenang lembaga anti rusuah tersebut. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa amandemen UU KPK diperlukan sebagai usaha penguatan

kelembagaan KPK.

Pegiat Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM dan Pusat Kajian hukum dan anti korupsi perguruan tinggi seluruh Indonesia menyatakan menolak revisi UU KPK karena cacat secara prosedural dan tidak transparan (tempo.co.id, 16 September 2019). Berbeda pendapat, sebagian kalangan justru mendukung amandemen UU KPK dengan alasan supaya KPK tidak menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan



tugasnya (cnnindonesia.com, 15 September 2019). Di tengah polemik amandemen UU KPK tersebut, DPR RI dan pemerintah tetap bergeming dan terus melanjutkan pembahasan amandemen UU KPK. Presiden Joko Widodo menilai bahwa UU KPK telah berusia 17 tahun sehingga memerlukan adanya penyempurnaan secara terbatas, agar pemberantasan korupsi dapat semakin efektif (liputan6.com, 13 September 2019).

Peristiwa pro dan kontra terkait kehendak untuk mengamandemen UU KPK selalu terjadi di tengah publik. Polemik sudah mulai tampak sejak kehendak mengamandemen digulirkan tahun 2010. Pada tahun 2012, Presiden memutuskan menolak membahas RUU KPK setelah usulan ini mendapatkan penolakan dari publik. Usulan amandemen muncul kembali pada tahun 2015 pada masa Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016 usulan tersebut ditolak oleh Presiden karena diwarnai aksi penolakan publik. Pada tahun 2017 usulan amandemen tersebut muncul kembali, namun tidak pernah dibahas hingga akhirnya muncul kembali ke publik pada tahun 2019 dan menuai kontroversi (tribunnews.com, 17 September 2019). Melihat perjalanan panjang amandemen UU KPK yang senantiasa diwarnai pro dan kontra, tulisan ini mencoba menganalisisnya dari perspektif kebijakan publik.

### **Perspektif Kebijakan Publik**

Hadirnya UU KPK adalah salah satu bentuk kebijakan publik (Riant Nugroho, 2014:27). UU dalam hal ini dimaknai sebagai kebijakan publik yang sengaja dibuat oleh negara untuk mengatasi masalah tingginya angka korupsi di

Indonesia. UU merupakan formal otorisasi bagi KPK untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

UU sebagai kebijakan public terbentuk melalui serangkaian tahapan yang disebut dengan siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik terdiri dari paling sedikit 4 (empat) tahapan, yaitu *pertama*, penetapan agenda (pengenalan masalah dan pemilihan isu). *Kedua*, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. *Ketiga*, tahap implementasi; *Keempat*, tahap evaluasi dan penghentian (Jann & Wegrich, 2014: 64-84).

Berbicara mengenai amandemen UU KPK tidak terlepas dari tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi kebijakan publik dapat menyebabkan pola beragam dari pembelajaran kebijakan, dengan implikasi yang berbeda dalam hal mekanisme umpan balik dan kemungkinan pengulangan proses kebijakan. Pola pertama adalah bahwa kebijakan yang berhasil akan diperkuat atau pola kedua yaitu penghentian kebijakan (Jann & Wegrich, 2014:78-79).

Menurut perspektif evaluasi kebijakan, amandemen terhadap UU KPK seharusnya dapat berimplikasi pada pilihan dari dua pola yaitu memperkuat kebijakan yang sudah ada atau menghentikan kebijakan. Dalam pola memperkuat kebijakan, maka amandemen UU KPK yang digagas oleh DPR RI seharusnya memperkuat institusi KPK. Sedangkan dalam pola penghentian kebijakan, maka alternatif kebijakan adalah membubarkan KPK. Evaluasi tersebut tentunya harus merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan UU KPK yang telah 17 tahun dijalankan. Namun, dalam kenyataannya, DPR

RI dan pemerintah menganggap konten amandemen UU KPK perlu disempurnakan terbatas di beberapa pasal. Konten amandemen tersebut yang telah menimbulkan polemik.

### **Mengapa Menjadi Kontroversial?**

Tidak dapat dipungkiri KPK menjadi salah satu lembaga yang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Namun, hampir di setiap tahun usulan amandemen UU KPK muncul, spontan menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Bahkan, sejumlah akademisi ramai-ramai melakukan petisi untuk menolak amandemen UU KPK (cnnindonesia.com, 9 September 2019).

Proses amandemen UU KPK tahun 2019 ini, oleh publik terkesan dilakukan secara diam-diam karena tidak melibatkan KPK sebagai *stakeholder* utama dan juga masyarakat luas. Badan Legislasi DPR RI berpendapat bahwa rencana melakukan amandemen tidak dilakukan secara diam-diam. Sejak tahun 2017, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan serangkaian uji publik di beberapa daerah. Bahkan, DPR RI membantah pernyataan anggota KPK yang mengungkapkan bahwa KPK tidak pernah diajak bicara mengenai amandemen UU KPK yang menjadi dasar pembahasan Badan Legislasi DPR RI pada tahun 2019. Sementara itu, menurut KPK sudah ada upaya KPK untuk meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk diikutkan dalam pembahasan RUU, namun tidak mendapat respons positif (kompas.com, 18 September 2019).

Dalam persepektif kebijakan publik, situasi ini dapat dianalisis dari pandangan Schneider dan

Ingram (Sidney, 2014: 121). Dijelaskan bahwa pembuatan kebijakan terjadi dalam konteks tertentu, ditandai oleh lembaga-lembaga dan ide-ide yang berbeda. Arena kelembagaan seperti kongres, pengadilan, badan eksekutif dan sejenisnya mempunyai aturan, norma dan prosedur yang mempengaruhi pilihan dan strategi aktor. Selain itu, pembuatan kebijakan berlangsung pada saat tertentu, ditandai oleh ide-ide dominan yang terkait masalah kebijakan, kelompok yang terkena dampak, peran yang tepat dari pemerintah, dan lain-lain. Ide-ide ini akan mempengaruhi argumen aktor dalam mendukung solusi tertentu, persepsi serta preferensi mereka dalam pengambilan kebijakan khusus.

Berdasarkan perspektif tersebut, pelibatan KPK dalam proses revisi UU KPK jelas amat diperlukan sebagai aktor yang terdampak. Sebagai konsekuensinya, KPK perlu didengar pendapatnya terkait revisi UU tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi argumen aktor-aktor lainnya berkenaan dengan aturan, norma, nilai dan prosedur yang sudah diterapkan di KPK. Sehingga, dengan demikian, keputusan yang diambil tidak dipandang asimetris oleh masyarakat. Tidak adanya keterlibatan KPK, seperti yang diberitakan beberapa media telah menimbulkan kepanikan publik, yang juga bisa dimaknakan kekecewaan, yang pada akhirnya menciptakan gelombang penolakan terhadap amandemen UU KPK.

Selain itu, DPR RI dan pemerintah, selaku pembuat kebijakan nasional penting untuk melihat data dan informasi sebagai dasar pembentukan

kebijakan (*evidence based policy*). Data dan informasi tersebut dapat memperkuat alasan DPR RI dan pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga publik dapat diyakinkan akan pilihan kebijakan yang diambil.

Dalam konteks amandemen UU KPK, dapat dilihat data dan informasi yang disajikan terkait Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis *Transparency International* (TI). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama kurun 2012 sampai 2018, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 dan 2013 IPK berada pada peringkat ke-32. Tahun 2014 di peringkat ke-34. Tahun 2015, naik dua peringkat menjadi peringkat ke-36. Tahun 2017 naik ke peringkat 37. Pada tahun 2018 IPK kembali naik peringkat menjadi ke-38 (databoks.katadata.co.id). Dalam perspektif ini, lembaga KPK tentu masih perlu dipertahankan.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kelembagaan KPK melalui amandemen UU KPK dapat melihat pada *benchmark* negara lain yang dianggap berhasil dalam pemberantasan korupsi seperti *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong. Penulis mencoba menyandingkan pola kerja *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong dengan pola kerja KPK di Indonesia.

Terdapat empat hal yang penulis dapat tarik dari pola kerja ICAC di Hong Kong, yaitu: *pertama*, terkait Dewan Pengawas. Kinerja ICAC di tingkat komisioner memiliki dewan yang disebut *Advisory Committee on Corruption*, yang menjalankan fungsi kontrol terhadap ICAC, agar tetap di

jalurnya. Adapun *Advisory Committee on Corruption* adalah kepanjangan tangan dari *Chief Executive* untuk mengawasi ICAC secara ketat, karena ICAC bertanggung jawab kepada pemimpin Hong Kong. Pada tingkat departemen sendiri, terdapat komite pengawas yang bertugas mengawasi kinerja dan memberikan rekomendasi atas departemen. Komite ini beranggotakan unsur-unsur masyarakat, yaitu antara lain *Operations Review Committee*, *Citizen Advisory Committee on Community Relations*. Sedangkan di Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan di KPK diatur kepada publik, sementara makna “publik” sendiri sangat luas (Farhan, 2013).

*Kedua*, wewenang. ICAC di Hong Kong hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Sedangkan di KPK selain wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga memiliki wewenang membuat penuntutan, sehingga dapat memicu terjadinya benturan dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya (Anastacia Novalina, 2018:14).

*Ketiga*, kewenangan penyadapan di ICAC Hong Kong dilakukan dengan selektif, dengan prasyarat terlebih dahulu meminta izin kepada *Chief Executive* Hong Kong, untuk alasan yang dapat dibenarkan (*Ibid*). *Keempat*, terkait pegawai. Pegawai di ICAC adalah pegawai negara. Ini artinya pegawai bukan milik pemerintah dalam arti *executive* melainkan milik negara. Dalam konteks sistem kepegawaian di Indonesia, menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua istilah ini memang mengarah kepada kesan pegawai pemerintah (*executive*), sehingga sulit mengakomodir lembaga-lembaga yang ingin memisahkan pegawainya dari arena *executive* agar memiliki wibawa ketika berhadapan dalam memeriksa pemerintah (dalam konteks *executive*).

### Penutup

Dalam perspektif kebijakan publik, revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019 - yang masih menyisakan kontroversi di tengah publik - dinilai masih akan menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Sebab, hilangnya suara aktor (*stakeholder*) dalam perumusan dan pembahasan kebijakan (tahap formulasi kebijakan) akan menimbulkan kendala dalam tahap implementasi.

Ke depan, DPR RI seharusnya melibatkan seluruh aktor atau *stakeholder* yang terdampak kebijakan, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar-institusi dan masyarakat. Selain pelibatan aktor, DPR RI sebagai pembuat kebijakan harus menjadikan bukti sebagai dasar pembentukan kebijakan (*evidence base policy*). Data dan informasi yang berasal dari lembaga kompeten (lembaga riset/survei) dapat dijadikan dasar berpikir dalam perumusan kebijakan. Perbandingan dengan negara lain dan lembaga lain juga dapat dipergunakan sebagai *benchmark*.

### Referensi

Farhan, Muhammad. (2013). *Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak*

*Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Independent Commission Against Corruption Hong Kong*. Jakarta: Universitas Indonesia.

"Indeks Korupsi Indonesia (2012 - 2017) 2018, [www.Databoks.katadata.co.id](http://www.Databoks.katadata.co.id), Transparency International, diakses 16 September 2019.

Jann, Werner dan Kai Wegrich. (2014). *Teori Siklus Kebijakan. Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Jakarta: Nusamedia.

"Jokowi: UU KPK Berumur 17 Tahun sehingga perlu penyempurnaan, tapi..." <https://m.liputan6.com/amp/4061760/jokowi-uu-kpk-berumur-17-tahun-sehingga-perlu-penyempurnaan-tapi>, diakses 16 September 2019.

"Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK Abai Kritik Hingga Tak Libatkan KPK?", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all>, diakses 18 September 2019.

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Nurak, Anastacia Novalina. (2018). *Perbandingan Strategi Lembaga Anti Korupsi: Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

"Operasi Senyap Revisi UU KPK?", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/06523871/operasi-senyap-revisi-uu-kpk?page=all>, diakses 17 September 2019.

"Pengamat Anggap Revisi UU Perlu Supaya KPK Tak 'Membabi Buta'". <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190915164859-12-430657/pengamat-anggap-revisi-uu-perlu-supaya-kpk-tak-membabi-buta>,

diakses 16 September 2019.

"Perjalanan Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010 hingga Kini Disahkan Dahulu SBY Menolak?" <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/17/perjalanan-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010-hingga-kini-disahkan-dahulu-sby-menolak?page=4>, diakses 18 September 2019.

"Revisi UU Amputasi KPK,Ramai-ramai Akademisi Tolak RUU". <https://m.cnnindonesia.com/nasional/.20190909154230-20-428803/>

revisi-uu-amputasi-kpk-ramai-ramai-akademisi-tolak-ruu, diakses 16 September 2019.

"Revisi UU KPK, Bola di Tangan Tuan Presiden". <https://fokus.tempo.co/amp/1248420/revisi-uu-kpk-bola-si-tangan-tuan-presiden>, diakses 23 September 2019.

Sidney, Mara S. (2014). *Perumusan Kebijakan: Desain dan Alat. Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode.* Jakarta: Nusamedia.



Anin Dhita Kiky Amrynudin  
[anin.amrynudin@dpr.go.id](mailto:anin.amrynudin@dpr.go.id)



Riris Katharina  
[riris.katharina@dpr.go.id](mailto:riris.katharina@dpr.go.id)  
[ririsk@yahoo.com](mailto:ririsk@yahoo.com)

Anin Dhita Kiky Amrynudin, S.A.P., M.Si lahir di Tegal, 21 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti Ahli Pertama III/b.

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah: Kasus Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Riris Katharina (ed.), Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dan Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018.

#### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.

## PANDUAN PENULISAN INFO SINGKAT 2019

1. Artikel yang dimuat dalam Info Singkat merupakan hasil analisis terhadap masalah aktual dan strategis, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Naskah dikirimkan kepada Redaksi pada Kamis minggu pertama dan Kamis minggu ketiga paling lambat pada pukul 13.00 WIB.
3. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1½, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
4. Jumlah halaman naskah minimal 6,5 halaman dan maksimal 7 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 6 halaman dan maksimal 6,5 halaman.
5. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Judul ditulis dengan huruf kapital.
7. Mencantumkan nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* pada halaman pertama.
8. Sistematika penulisan: Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Isi (informasi/ isu aktual, data, analisis, alternatif kebijakan), Penutup (Simpulan dan/atau Rekomendasi), dan Referensi.
9. Abstrak ditulis di bawah judul dan nama penulis dengan huruf Arial ukuran 11, spasi 1, sebanyak 100 - 150 kata.
10. Sumber kutipan dari buku ditulis dalam bentuk catatan perut.  
Contoh: (Harefa, 2016: 23)
11. Kutipan dari sumber lain seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Referensi.
12. Penulisan referensi diurutkan sesuai urutan abjad dengan tata cara seperti contoh berikut:

"Masa Tanggap Darurat Diperpanjang", *Media Ināonesia*, 24 September 2013, hal. 7.

Moon, M. & K. S. Kim. 2001. "A Case of Korean Higher Education Reform: The Brain Korea 21 Project". *Journal of Asia Pacific Education Review*, Vol. 2, No. 2, pp. 96-105.

Uitto, Juha I. dan Asit K. Biswas. 2000. *Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives*. Tokyo: United Nations University Press.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2010. *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*. UNDP.

"Warga Miskin Ngawi Kesal Ikut Program BPJS Diharuskan Bayar Iuran", <http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/13/warga-miskin>, diakses 15 Januari 2014.

**Lampiran 6. Output Leaflet Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam  
Penulisan Info Singkat**

(Halaman berikutnya)



SEKRETARIAT JENDERAL &  
BADAN KEAHLIAN DPR RI

# METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT



## Pusat Penelitian

Sekretariat Jenderal  
dan Badan Keahlian DPR RI

METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK  
DALAM PENULISAN INFO SINGKAT

Info Singkat adalah salah satu produk rutin Pusat Penelitian di Badan Keahlian DPR RI. Topik yang dimuat dalam penulisan Info Singkat bersifat aktual dan dikaji secara praktis untuk menjadi perhatian DPR RI.

Kenyataannya, dalam menentukan topik Info Singkat banyak ditemui kendala untuk menentukan topiknya. Kendala tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu : **Pertama**, isu yang berkembang dinamis artinya isu dalam sepekan dapat sewaktu-waktu berubah dalam waktu yang singkat. **Kedua**, adanya kecenderungan menulis diluar topik yang aktual dalam sepekan melainkan hanya berdasarkan kepakaran saja. **Ketiga**, kesulitan dalam menentukan teori yang sesuai dengan isu yang aktual.

Adanya beberapa kendala tersebut diatas maka diperlukan suatu metode dalam menentukan topik Info Singkat sehingga Info Singkat yang diterbitkan dapat memberikan manfaat bagi anggota DPR RI khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hadirnya *leaflet* ini diharapkan menjadi sebuah panduan atau metode bagi calon peneliti untuk menentukan topik dalam penulisan Info Singkat secara sistematis.



## METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK PENULISAN INFO SINGKAT

Metode pemilihan topik penulisan Info Singkat ini dilakukan melalui lima tahapan. *Pertama*, identifikasi masalah topik penulisan Info Singkat sebelumnya. *Kedua*, Diskusi usulan isu. *Ketiga*, identifikasi penentuan konsep/teori/regulasi. *Keempat*, Analisis Penentuan Topik Info Singkat. *Kelima*, Penulisan Info Singkat.

### 1. Identifikasi masalah topik penulisan Info Singkat sebelumnya

Tahap pertama, penulis melakukan identifikasi masalah kedekatan topik yang dipilih dengan isu yang aktual pada saat itu. Selain itu, pada tahap ini pula penulis perlu mengetahui topik dan judul yang pernah diangkat melalui identifikasi masalah topik penulisan Info Singkat sebelumnya sebagai acuan menentukan judul penulisan untuk menghindari redudansi penulisan dengan topik, judul dan analisis yang sama.

Judul Info Singkat	Isu Media Cetak	Kedekatan dengan Isu

### 2. Diskusi Usulan Isu

Tahap kedua, penulis Info Singkat melakukan diskusi bersama koordinator bidang, peneliti dengan kepakaran yang sama dan salah satu redaksi. Hasil dari diskusi tersebut adalah usulan isu yang diberikan koordinator bidang, peneliti dengan kepakaran yang sama dan salah satu redaksi beserta alasan mengapa isu tersebut layak dipertimbangkan menjadi topik Info Singkat. Tujuannya adalah supaya penulis memiliki gambaran terkait isu-isu yang aktual untuk selanjutnya dapat dilakukan identifikasi terhadap konsep/regulasi/teori yang relevan

FORM 2. USULAN ISU

No.	Nama	Usulan Isu	Alasan

### 3. Identifikasi penentuan konsep / teori / regulasi

Tahapan ketiga, penulis melakukan identifikasi konsep / teori / regulasi yang relevan dengan isu-isu yang diusulkan pada tahap kedua. Identifikasi penentuan konsep/teori/regulasi tersebut dapat dilakukan dengan telaah pustaka dari berbagai buku, jurnal, e-book, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Tujuan pada tahap ini adalah agar pada saat menulis Info Singkat sudah mengetahui dan memiliki materi-materi seputar topik yang diangkat sehingga dalam menulis Info Singkat lebih efektif dan efisien

FORM 3. IDENTIFIKASI PENDEKATAN KONSEP / REGULASI / TEORI

No.	Isu sepekan	Teori / Regulasi	Penjelasan Singkat
1.	Contoh : Revisi Undang-Undang KPK	- Formulasi Kebijakan Publik - Evaluasi Kebijakan Publik	- Teori formulasi kebijakan publik menurut : Howlett dan Ramesi /Schneider&Ingram - Teori Evaluasi kebijakan publik menurut: Werner Jann & Kai Wegrich
2.	Dst.		
3.	Dst.		

### 4. Analisis Penentuan Topik

Tahapan keempat, penulis mulai menentukan topik yang akan diangkat dengan metode telly da urgensi isu. Metode ini dapat memantau perkembangan isu-isu yang terjadi dalam sepeka sehingga pada akhirnya isu yang terpilih benar benar isu yang aktual dan objektif.

FORM 4. IDENTIFIKASI PENENTUAN TOPIK INFO SINGKAT

No.	Isu	Telly	Jumlah	Surat Kabar	Tanggal

Selanjutnya, penulis melaporkan hasil identifikasi topik penulisan Info Singkat kepada Koordinator Bidang dan peneliti dengan kepakaran yang sama terkait topik yang terpilih. Selanjutnya penulis dan peneliti dengan kepakaran yang sama akan mendiskusikan judul yang tepat sesuai dengan teori dan kemanfaatan bagi dewan.

### 5. Penulisan Info Singkat

Tahapan kelima adalah mulai melakukan penulisan Info Singkat. Penulis mulai menulis draft awal Info Singkat yang selanjutnya melakukan pembimbingan dan revisi dengan peneliti dengan kepakaran yang sama dan redaksi sampai Info Singkat diterbitkan.

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT  
METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : Aryo Wanzo

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : PDN

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		

Saran :

identikasi menjadi bagian penting dalam menulis, untuk memperjelas tema dan kajian, persiapkan metode ini dalam bentuk yang lebih menarik.

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT  
METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : SIDIQ BUDI SEJATI

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : POLITIK DALAM NEGERI

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		

Saran :

Sungguh luar biasa, brosur "metode identifikasi pemilihan topik dalam penulisan info singkat" ini sangat<sup>lah</sup> membantu. Dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Sudah pasti metode yang dikemas dalam brosur ini akan bermanfaat untuk saya dalam penulisan info singkat selanjutnya.

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT**  
**METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : ZIMAD FALAH

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : FI

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		
Saran :				

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT  
METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : *Novedi Rya Saputra*

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : *Hukum*

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		
Saran : <i>Metode ini akan sangat berguna bagi CPNS, diharapkan dalam pembuatan info singkat menggunakan metode ini agar mendapatkan isu/topik yang sesuai ..</i>				

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT  
METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : ~~Andi~~ ~~Judhedi~~ Burhanudin

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : ~~...~~ EKP

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		

Saran : Metode ini sangat berguna bagi C.F.A.S  
Pusket. Semoga menjadi habit yg baik bagi C.F.A.S

**KUESIONER TANGGAPAN CALON PENELITI TERKAIT  
METODE IDENTIFIKASI PEMILIHAN TOPIK DALAM PENULISAN INFO SINGKAT**

NAMA : Rais Agil Bahtiar

JABATAN : CALON PENELITI AHLI PERTAMA

BIDANG : EKP

No.	Pertanyaan	Jawaban		
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju
1.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat dibutuhkan sebelum menulis Info Singkat	✓		
2.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Mudah Dipahami	✓		
3.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik dalam Penulisan Info Singkat Bermanfaat bagi Anda	✓		
4.	Metode Identifikasi Pemilihan Topik ini akan Anda gunakan saat menulis Info Singkat	✓		
Saran : Metode Identifikasi Pemilihan Topik Info Singkat berguna dalam menulis Info Singkat				